



5. Strategi Potensial Yang Dapat Diaplikasikan Dalam Meningkatkan Kemampuan Profesional Guru Secara Berkelanjutan Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Terkait

- Model *in-house training* dan pembinaan guru di KKG/MGMP dianggap perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka pembinaan profesional guru pasca sertifikasi, dengan alasan bahwa *in-house training* maupun KKG/MGMP adalah kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan guru dan tidak memerlukan biaya yang mahal.
- Program kegiatan yang diutamakan pelaksanaannya adalah 1) program penguatan kualifikasi dan tugas pokok guru, 2) pengembangan profesi berkaitan dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki, dan 3) pendukung profesi kaitannya dengan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan.
- Dukungan Pelaksanaan
 - Pemerintah daerah belum maksimal dalam memberikan dorongan dan bantuan dalam pengembangan profesi guru.
 - Pihak-pihak yang dianggap bisa memberi dukungan dalam pembinaan kemampuan profesional guru antara lain (1) pemerintah daerah (meningkatkan peran serta guru dalam forum-forum ilmiah), (2) LPMP (memberikan pelatihan-pelatihan rutin kepada para guru, terutama pelatihan karya tulis ilmiah (KTI)), (3) Kepala sekolah (memberikan kesempatan untuk aktif dalam MGMP dan mengikuti seminar, melakukan supervisi secara reguler terhadap kinerja guru di kelas).



C. Rekomendasi

PLPG memperlihatkan kemampuan dalam membekali guru-guru tetapi masih jauh untuk disebut memadai, meski terdapat indikasi peningkatan kinerja guru. Efektifitas PLPG yang optimal sangat memerlukan pembenahan dan penyempurnaan lebih lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyelenggara PLPG perlu melaksanakan *training needs assessment* (TNA) dengan memberikan tes yang terstandar yang mencakup antara lain kebutuhan aktual guru dan materi ajar diklat.
- Penyelenggara PLPG perlu mempersiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) agar materi pelatihan lebih terfokus dan terstandar
- Perlu dikembangkan model paket-paket pelatihan sesuai dengan kebutuhan actual guru sebagaimana hasil *needs assessment*-nya
- Penyelenggara PLPG perlu melaksanakan evaluasi dampak diklat secara reguler terhadap pengguna lulusan minimal 3 bulan setelah peserta PLPG kembali ke sekolah. Evaluasi dampak diklat sangat bermanfaat untuk peningkatan pelaksanaannya.
- Perlu dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berupa kebijakan, program, fasilitas, dana, dan model-model pembinaan yang memadai dan berkesinambungan misalnya penyelenggaraan IHT, KKG/MGMP dan *lesson study* dalam upaya membina guru-guru pasca Sertifikasi di wilayahnya.
- Dinas Pendidikan kabupaten/kota perlu melibatkan peran P4TK dan LPMP dalam pembinaan guru-guru pasca sertifikasi terutama terkait dengan pengembangan teknis pendidikan dan kompetensi kerja guru.
- Pengawas dan kepala sekolah perlu mengoptimalkan peran konsultatif (sebagai Pembina, pembimbing dan memberikan bantuan kepada guru sesuai dengan kompetensi yang diembannya dalam turut memecahkan permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru).
- Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas, Ditjen Dikdas perlu mulai menyelenggarakan ujisertifikasi melalui tes kompetensi secara reguler.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Puslitjak Balitbang Kemdiknas,
Gedung E, Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp: (021) 573-6365, 571-3827; Faks: (021) 574-1664
e-mail: puslitjaknov@yahoo.com



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN

2010
RINGKASAN EKSEKUTIF

STUDI KUALITATIF TENTANG SERTIFIKASI GURU: Kinerja Pendidikan dan Latihan Profesi Guru/PLPG dan Pola Pembinaan Guru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan strategis dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru (UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, salah satunya Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga penelitian SMERU pada tahun 2007 menunjukkan bahwa persentase sasaran peserta PLPG sertifikasi 2007 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengajukan portofolio. Persentase terendah (37%) terjadi di Majalengka-Jabar (dari 680 peserta Portofolio terdapat 251 guru yang dinilai tidak lulus). Sedangkan tertinggi (90%) terjadi di Melawi-Kalbar (dari 90 peserta Portofolio terdapat 81 guru yang dinilai tidak lulus).

Sedangkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev Independen Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) tahun 2007 ditemukan (i) materi tidak dipersiapkan dengan baik, (ii) Beberapa LPTK gagal menyelesaikan Diklat, (iii) Tidak ada korelasi antara hasil portofolio (peserta yang tidak lulus) dan materi Diklat, (iv) Kisaran waktu diklat 10 – 15 jam per hari dilaksanakan dalam 7–10 jam per hari.

Hasil Joint Audit Atas Sub Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan menunjukkan bahwa: (i) pelaksanaan PLPG tidak sesuai jadwal, (ii) sertifikat pendidik diterbitkan mendahului PLPG, Ujian ulang, SK penetapan kelulusan, (iii) tidak dibentuk panitia sertifikasi guru, (iv) tingkat kelulusan peserta sertifikasi sangat rendah.

Secara konseptual, guru-guru yang bersertifikasi baik melalui portofolio maupun melalui PLPG seharusnya menunjukkan peningkatan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. Masih belum banyak penelitian tentang pelaksanaan PLPG dan dampaknya. Dengan pertimbangan itu, maka dilakukanlah penelitian ini.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Permasalahan yang ada adalah —Bagaimana efektifitas pelaksanaan PLPG di LPTK dan dampaknya terhadap kompetensi dan kinerja guru, serta bagaimana program pembinaan guru pasca sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan PLPG oleh LPTK dilihat dari sembilan komponen PLPG, (ii) mengetahui dan menganalisis

dampak PLPG terhadap kinerja mengajar guru dilihat dari lima komponen kinerja mengajar, (iii) mengetahui dan menganalisis dampak PLPG terhadap peningkatan kompetensi guru dilihat dari empat komponen kompetensi, (iv) mengetahui dan menganalisis pola pembinaan guru pasca sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, (v) menggali strategi potensial yang dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan.

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung data kuantitatif. Penelitian mengambil 20 kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja dari delapan LPTK penyelenggara PLPG (Tabel 1). Lingkup penelitian adalah Pelaksanaan PLPG tahun 2009 untuk guru-guru jenjang pendidikan dasar.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, pengisian angket, dan tes. Informan dalam penelitian pada setiap lembaga adalah Ketua Panitia Sertifikasi Guru (PSG), Ketua Divisi Diklat dan Divisi lain yang relevan, serta instruktur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas SD dan SMP, Kepala Sekolah, dan Guru Lulus PLPG.

Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas proses pelaksanaan PLPG, diperoleh dari hasil: studi dokumen, wawancara dengan Ketua Panitia Sertifikasi Guru (PSG), wawancara dengan instruktur, observasi instruktur pada saat memberi materi diklat, wawancara dengan guru SD dan SMP tersertifikasi lulus melalui PLPG.

Untuk mengetahui dan menganalisis dampak PLPG terhadap peningkatan kompetensi guru diperoleh dari hasil tes kompetensi guru SD dan guru SMP. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelaksanaan PLPG terhadap kinerja guru diperoleh dari hasil: (a) penilaian kepala sekolah SD dan SMP terhadap guru tersertifikasi lulus PLPG, (b) Observasi terhadap guru SD dan SMP tersertifikasi lulus melalui PLPG, dan (c) Observasi terhadap guru SMP tersertifikasi lulus melalui PLPG.

Untuk menggali strategi potensial yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan diperoleh dari hasil: (a) wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, (b) Pengawas, dan (c) wawancara dengan kepala SD dan kepala SMP.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Proses Penyelenggaraan PLPG

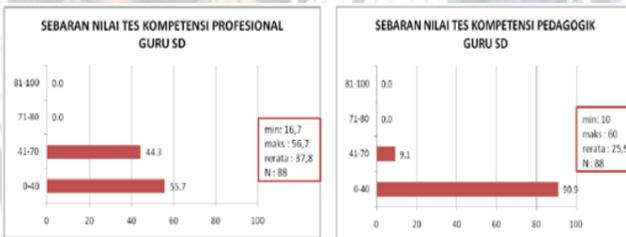
- a. Panitia Pelaksana PLPG di LPTK, tidak melakukan analisis kebutuhan materi diklat secara khusus kepada peserta sesuai dengan kebutuhan guru, tetapi menjabarkan panduan program diklat yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Ditjen Dikti. Pada umumnya, sebelum pelaksanaan PLPG, PSG masing-masing LPTK melakukan lokakarya untuk membahas hal-hal yang lebih bersifat teknis operasional dan perlu diperhatikan dalam program PLPG. Kebutuhan guru yang tercermin dari hasil portofolio belum dijadikan dasar dalam mengelompokkan guru pada waktu mengikuti PLPG. Dengan kata lain semua guru meskipun berbeda kekurangan kebutuhannya, tetapi mendapat perlakuan yang sama yaitu 90 jam.
- b. Kurikulum pokok program PLPG menetapkan bahwa jumlah jam belajar peserta adalah 90 jam pelajaran @50 menit untuk semua materi ajar pokok PLPG yang ditetapkan dalam panduan PLPG.
- c. Peserta diklat tidak dikelompokkan berdasarkan hasil penilaian portofolio. Peserta dikelompokkan berdasarkan jenjang sekolah, dan atau mata pelajaran serumpun, peserta masing-masing rombel rata-rata 30 orang.
- d. Instruktur ditetapkan oleh ketua PSG berdasarkan usulan dari program studi masing-masing. Instruktur dapat berasal dari LPTK yang menyelenggarakan PLPG, LPTK mitra, maupun WidyaSwara dari LPMP. Persyaratan instruktur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KSG Ditjen Dikti,
- e. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota rayonnya dengan memperhatikan kelayakan untuk proses pembelajaran (memiliki ruang belajar yang mencukupi kebutuhan setiap putaran diklat, akomodasi yang mencukupi jumlah peserta setiap putaran diklat, dan fasilitas ruang makan dan catering yang dibutuhkan). Penyelenggaraan PLPG di luar kampus dilakukan melalui sewa kontrak tempat diklat.
- f. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Dalam praktek, peserta banyak dilatih untuk melakukan analisis kasus, diskusi kelompok, dan *peer teaching* (tiga hari secara terus menerus dan instruktur berperan sebagai supervisor). Pendekatan pembelajaran yang banyak diterapkan dalam diklat adalah pendekatan andragogis.
- g. Seluruh kebutuhan pelatihan baik yang terkait langsung dengan teknis pembelajaran seperti buku,

- papan tulis, LCD, alat peraga, dan komputer, maupun yang terkait dengan kebutuhan harian peserta seperti makan, minum, kebugaran, dan kesehatan dilayani sepenuhnya oleh panitia. Anggaran yang diperuntukkan bagi peserta adalah Rp. 125 ribu/peserta/hari. Dengan harga itu mereka mendapatkan fasilitas makan 3 kali, *coffee break* 3 kali, ruangan *meeting* lengkap meja kursi, kelas, LCD, dan fasilitas kesehatan.
- h. Semua LPTK melaksanakan evaluasi kepada peserta diklat melalui *pre tes* dan *postes* untuk semua materi ajar PLPG yang ditetapkan. *Pretest* dilakukan secara tertulis (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional awal peserta, sedangkan uji kompetensi dilakukan pada akhir PLPG dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG.
- i. Panitia PLPG belum pernah melaksanakan evaluasi dampak diklat PLPG pada setiap angkatan kepada pengguna lulusan PLPG (sekolah). Alasannya karena tidak tersedia dana untuk kegiatan tersebut, walaupun mereka setuju bahwa evaluasi dampak diklat penting untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan PLPG.

2. Dampak PLPG Terhadap Kompetensi Guru

Tes kompetensi guru yang dilakukan meliputi (i) kompetensi profesional, (ii) kompetensi pedagogic, (iii) kompetensi kepribadian, dan (iv) kompetensi sosial

a. Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru SD



Grafik 1. Sebaran Nilai Tes Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru SD

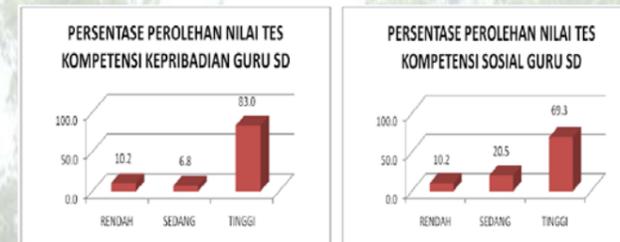
Hasil tes kompetensi profesional guru SD menunjukkan nilai tertinggi 56,7, terendah 16,7 dan rata-rata 37,8. Jumlah guru yang mencapai nilai 51-60 sangat sedikit (5,7 %), sebaliknya sebagian besar guru (94,3%) mencapai nilai <41. Hasil tes tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar guru SD kurang optimal dalam memanfaatkan hasil pelatihan dari PLPG untuk pengembangan diri mereka khususnya dalam hal kompetensi profesional.

Hasil tes kompetensi pedagogik guru SD menunjukkan nilai tertinggi 60, terendah 107 dan rata-rata 25,9. Jumlah guru yang mencapai nilai 51-60 sangat sedikit (5,7 %), sebaliknya sebagian besar guru (94,3%) mencapai nilai <41. Hasil tes tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar guru SD kurang optimal dalam memanfaatkan hasil pelatihan dari PLPG untuk pengembangan diri mereka khususnya dalam hal kompetensi pedagogik.

b. Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru SD

Hasil tes kompetensi kepribadian guru SD cukup

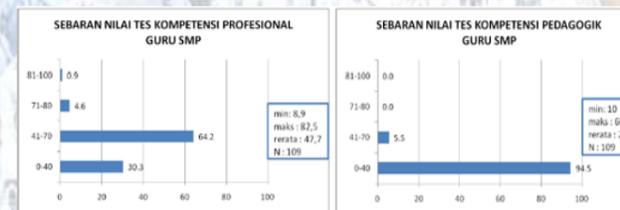
menggembirakan (lihat Grafik 2). Dalam grafik terlihat bahwa sebanyak 83.0% guru SD memperoleh skor tinggi untuk kompetensi kepribadian. Sementara 6.8 % memperoleh skor sedang, dan 10.2 % mencapai skor rendah



Grafik 2 menunjukkan bahwa nilai kompetensi sosial hasil tes guru SD lulus PLPG juga cukup tinggi. Sebanyak 69.3 % guru SD memperoleh skor kompetensi sosial tinggi. Sedangkan mereka yang mendapatkan skor sedang ada sejumlah 20,5% dan skor rendah hanya 10.2 %.

Dari hasil tes terhadap empat komponen kompetensi guru SD terlihat bahwa tingkat kompetensi kepribadian dan social tidak menentukan tingkat kompetensi profesional dan pedagogik guru.

c. Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru SMP



Hasil tes kompetensi profesional guru SMP menunjukkan nilai tertinggi 82,5 terendah 8,9 dan rata-rata 47,7. Jumlah guru yang mencapai nilai 70-100 sangat sedikit (5,5 %), sebaliknya sebagian besar guru (94,5%) memperoleh nilai <70. Hasil tes tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar guru SMP kurang optimal dalam memanfaatkan hasil pelatihan dari PLPG untuk pengembangan diri mereka khususnya dalam hal kompetensi profesional.

Hasil tes kompetensi pedagogik guru SMP menunjukkan nilai tertinggi 60 terendah 10 dan rata-rata 24,4. Tidak ada guru yang mencapai nilai 70, sebaliknya semua guru (100 %) mencapai nilai <70. Hasil tes tersebut dapat diartikan bahwa semua guru SMP kurang optimal dalam memanfaatkan hasil pelatihan dari PLPG untuk pengembangan diri mereka khususnya dalam hal kompetensi pedagogik.

d. Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru SMP

Dari hasil tes diketahui bahwa nilai kompetensi kepribadian, guru SMP lulus PLPG sebagian besar berada pada skor tinggi, dengan pencapaian 94.5 %, Sisanya, skor sedang 0.9 % , dan skor rendah 4.6%.

Dari hasil tes diketahui bahwa pencapaian nilai kompetensi Sosial guru SMP lulus PLPG sebagian besar berada pada skor tinggi dengan mencapai

78,0%, sementara yang memperoleh skor sedang sebanyak 16,5 % dan skor rendah 5,5%.

Dari hasil tes terhadap empat komponen kompetensi terlihat bahwa kompetensi kepribadian dan social tidak menentukan tingkat kompetensi profesional dan pedagogik guru.

3. Dampak PLPG Terhadap Kinerja Mengajar Guru

a. Kinerja Mengajar Guru SD dan Guru SMP

Kinerja guru dinilai oleh kepala sekolah mengalami cukup peningkatan dengan rerata nilai peningkatannya sebesar (3,32). Rerata peningkatan untuk guru SD (3,28), dan rerata peningkatan untuk guru SMP (3.35). Hal ini menunjukkan bahwa PLPG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dalam aspek menyusun RPP, Pra Pembelajaran, Penguasaan Materi Pembelajaran, Pendekatan/ Strategi Pembelajaran, dan Penilaian hasil belajar siswa, baik untuk guru SD maupun guru SMP.

Tabel 2. Nilai Peningkatan Kinerja Guru berdasarkan Penilaian KepSek

Aspek yang Dinilai Kepala Sekolah	Rerata Skor	
	SD	SMP
Penyusunan RPP	3.20	3.24
Pra Pembelajaran	3.38	3.38
Penguasaan Materi Pembelajaran	3.27	3.32
Pendekatan/ Strategi Pembelajaran	3.26	3.39
Penilaian	3.27	3.42
Rerata Skor	3.28	3.35

4. Pola/Model Pembinaan Guru Pasca Sertifikasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

- a. Pembinaan kemampuan profesional guru pasca sertifikasi secara khusus belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas maupun Kepala Sekolah sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Pembinaan yang ada pada saat ini berlaku umum bagi semua guru dengan menggunakan pola lama seperti: *In-House Training* (IHT), Semiloka, dan kegiatan KKG/MGMP.
- b. Aspek-aspek dalam pembinaan profesional guru yang sudah diselenggarakan di kabupaten/kota adalah disiplin pelaksanaan tugas mengajar dan pemenuhan persyaratan administratif mengajar, yang meliputi komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran (penggunaan metode mengajar yang bermakna dan inovatif, PAIKEM, belajar berkelompok seperti dalam CBSA dan CTL), media dan alat pembelajaran termasuk informasi teknologi di kelas.

Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan masih memegang peran penting untuk pembinaan terhadap guru. Indikator keberhasilan pembinaan adalah guru memahami hak dan kewajibannya sebagai PNS, memahami profesinya sebagai guru, pola pikir dan komitmen guru meningkat, sekolah berkompetisi dengan sekolah lain untuk lebih meningkatkan nilai akademik dan nilai non akademik, meningkatnya nilai ujian nasional (NUN), sebagian besar guru dapat membuat RPP dengan benar dan membuat kisi-kisi dan soal yang baik